Proyeksi Perkembangan Perkoperasian 2019 *Cooperative Outlook 2019*

Heri Nugraha¹⁾; Eka Setiajatnika²⁾; Fitriana Dewi Sumaryana³⁾; Muhammad
Ardi Nupi Hasyim⁴⁾

Institut Manajemen Koperasi Indonesia ^{1,2,3,4}

email: ziki007@yahoo.co.id¹⁾; ekasetiajatnika@gmail.com²⁾ fitriads@yahoo.co.id³⁾
ardi.nupi@yahoo.co.id⁴⁾

Disubmit: 19 Juli 2019; Direvisi: 17 September 2019; Dipublish: 1 Oktober 2019

Abstract

This article aims to determine the development of cooperatives in West Java at present, projections of the development of cooperatives in West Java in 2019 and the contribution of cooperatives to the economy of West Java. The research methods used are explanatory research, data collection conducted by surveys, interviews, observations, and FGD and using a simple regression analysis approach of secondary data sourced from BPS, Kemenkop, Dinas KUKM West Java province. The results of the study show that the condition of cooperatives in terms of quantity in West Java can now be said to deteriorate. Inactive cooperatives are far more than active cooperatives. Whereas in previous years, namely in 2015-2017 active cooperatives dominated more than inactive cooperatives and West Java cooperative contributions to state revenues were still relatively small.

Keywords : Cooperative Outlook; Cooperative Contribution; West Java

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perkoperasian di Jawa Barat saat ini, proyeksi perkembangan perkoperasian di Jawa Barat tahun 2019 dan sumbangan koperasi terhadap perekonomian Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *explanatory* (penjelasan), pengumpulan data dilakukan dengan survei, wawancara, observasi, dan FGD dan menggunakan pendekatan analisis regresi sederhana dari data sekunder yang bersumber dari BPS, Kemenkop, Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat. Hasil Penelitian menunjukkan kondisi koperasi dilihat dari segi kuantitas di Jawa Barat saat ini dapat dikatakan memburuk. Koperasi yang tidak aktif jauh lebih banyak dari koperasi yang aktif. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2015-2017 koperasi aktif lebih mendominasi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif serta Sumbangan koperasi Jawa Barat terhadap penerimaan negara masih tergolong kecil.

Kata kunci: Proyeksi Koperasi; Kontribusi Koperasi; Jawa Barat

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang lahir di dalam kehidupan ekonomi bersama-sama dengan berbagai bentuk perusahaan lainnya. Koperasi sebagai salah satu alternatif yang dipilih di antara berbagai jenis bentuk perusahaan. Koperasi lebih merupakan asosiasi dari sekelompok individu yang dilembagakan ke dalam bentuk usaha formal. Maka koperasi lebih tepat disebut sebagai kumpulan kegiatan atau kepentingan ekonomi yang sama dari sejumlah individu yang bergabung di dalamnya sehingga terciptalah homogenitas kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan meningkatkan efisiensi karena perhitungan skala ekonomi menyangkut suatu produk tertentu. Akhirnya, penguatan posisi tawar (*bargaining power*) terbangun melalui organisasi koperasi. prinsip koperasi yang universal adalah *self-help*, berarti sasaran untuk membangun keswadayaan kelompok justru harus dijadikan landasan kerja kelompok yang berkoperasi.

Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh koperasi seperti efisiensi biaya serta dari peningkatan *economies of scale* jelas menjadikan koperasi sebagai sebuah bentuk badan usaha yang sangat prospektif di Indonesia. Koperasi diharapkan menjadi aktor dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Koperasi Indonesia tidak sekedar sebagai badan usaha seperti firma, perseroan terbatas, tetapi koperasi Indonesia merupakan agen pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berperan untuk menyebarluaskan jiwa dan semangat koperasi untuk dapat dikembangkan pada perusahaan swasta dan negara (Sukidjo, 2008).

Ramudi Ariffin (2013:18) mengemukakan, bahwa evaluasi terhadap kinerja koperasi sebagai unit ekonomi mikro dan sebagai gerakan koperasi secara garis besar terbagi ke dalam evaluasi mikro dan evaluasi makro. Evaluasi mikro menunjukkan kinerja koperasi sebagai unit ekonomi yang bekerja secara efektif dan efisien. Sedangkan, evaluasi makro, menggambarkan peran dan kontribusi gerakan koperasi terhadap kehidupan ekonomi nasional dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM Jumlah koperasi aktif di Indonesia tahun 2017 ada sebanyak 153.171 unit. Dari jumlah tersebut, anggota koperasi aktif tercatat mencapai sebanyak 26.535.640 orang. Selama 2017, juga tercatat ada koperasi yang tidak sehat sebanyak 62.347 unit. Tahun 2018, sebanyak 4.013 koperasi juga ditutup karena sudah tidak ada aktifitas di dalamnya atau melanggar ketentuan. Sedangkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat mencatat bahwa Jumlah Koperasi di Jawa Barat belum berkembang secara signifikan, terlihat pada tahun 2017 unit koperasi sebanyak 25.774 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 16.664 unit dan jumlah koperasi tidak aktif 9.110 unit. Sebaran koperasi di Jawa Barat masih terkonsentrasi di Kota Bandung dengan jumlah 2.577 unit dengan persentase keaktifan sebesar 84 persen. Angka tersebut masih kecil jika melihat kontribusi koperasi di negara Eropa yang mencapai 8 persen. Saat ini, Kementerian Koperasi dan UMKM menjalankan Reformasi Total Koperasi melalui tiga langkah strategis, yakni Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan. Tujuannya adalah mengembangkan koperasi secara berkualitas sebagai organisasi yang memberikan kesejahteraan kepada anggotanya dan kemanfaatan kepada masyarakat.

Dalam penelitian Bambang Suprayitno (2007) mengungkapkan bahwa pada masa orde lama banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami

kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor. Permasalahan tersebut masih belum terpecahkan sampai saat ini. Disamping itu, kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian masih rendah.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory* (penjelasan) yaitu apabila data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel- variabel melalui pengujian hipotesa, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa atau penelitian *explanatory* (penjelasan). (Singarimbun dan Effendi :1998:5).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara, penyebaran kuesioner, dokumentasi yang berasal dari koperasi di Jawa Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia dan lembaga lainnya.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah koperasi yang ada di Jawa Barat. Sample yang akan diambil ada 30 unit Koperasi yang tersebar di daerah Jawa Barat. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana manfaat ekonomi yang dirasakan oleh anggota koperasi di Jawa Barat.

2.4 Metode Analisis

Variabel dalam penelitian ini meliputi Kinerja Koperasi dan Kontribusi koperasi terhadap perekonomian dengan teknik analisis yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Variabel bebas (x) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode, dan variabel terikat (y) yang digunakan adalah volume usaha sebagai indikator kinerja koperasi.

Rumus untuk model regresi untuk proyeksi (*forecast*):

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \dots\dots\dots (1)$$

$$b = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

x = periode waktu

y = volume usaha koperasi

Model ini digunakan untuk membuat proyeksi (*forecast*) indikator-indikator ekonomi. Selain itu juga menggunakan teknik analisis sensitivitas, suatu analisis untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Perkoperasian di Indonesia

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kontribusi sektor koperasi terhadap total Produk Domestik Bruto Nasional (PDB) per triwulan III 2017 mencapai 4,48 persen. Adapun nilai PDB nasional per triwulan III 2017 mencapai Rp10.096 triliun. Dengan demikian, kontribusi sektor koperasi terhadap PDB Nasional, berdasar data per triwulan III 2017, nilainya setara Rp452 triliun. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan kontribusi koperasi terhadap PDB di periode yang sama pada 2016, yakni 3,99 persen. Artinya, kenaikan kontribusi sektor koperasi terhadap PDB pada tahun ini mengalami kenaikan sekitar 0,5 persen dibanding 2016. Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2017. Pada tahun 2014 besar kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 1,71 persen. Besar kontribusi anggota dan lembaga koperasi terhadap PDB Nasional tahun 2017 adalah sebesar 30,84 persen. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kontribusi anggota dan lembaga koperasi terhadap PDB Nasional mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 17, 28 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2016, kontribusi anggota dan lembaga koperasi terhadap PDB Nasional mengalami peningkatan sebesar 10,13 persen. Di tahun 2016 pada skala usaha kecil, kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional berada pada angka 0,53 persen. Sedangkan pada skala usaha menengah anggota koperasi memiliki kontribusi yang sangat rendah terhadap PDB Nasional yaitu hanya sebesar 0,05 persen. Pada skala usaha mikro, kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu sebesar 43,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dengan skala usaha mikro memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDB Nasional jika dibandingkan dengan skala usaha kecil dan menengah. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM jumlah koperasi di Indonesia berjumlah 153.171 unit dengan jumlah anggota aktif 26,53 juta orang, sedangkan UMKM berjumlah 59,26 juta unit yang menyerap tenaga kerja lebih dari 123,2 juta orang. Ini berarti lebih dari 96,71% tenaga kerja merupakan kontribusi koperasi dan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

3.2 Kondisi Perkoperasian di Jawa Barat

Jawa Barat termasuk salah satu wilayah dengan jumlah koperasi terbanyak di Indonesia. Saat ini jumlah koperasi di Jawa Barat mencapai 25.658 unit, yang tersebar di 9 kota dan 18 kabupaten di Jabar. Jumlah koperasi terbesar di Jawa Barat terdapat di Kota Bandung yaitu sebesar 2.577 koperasi atau 10,43 persen dari keseluruhan jumlah koperasi di Jawa Barat, diikuti oleh Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar 1.765 koperasi atau 7,15 persen dari keseluruhan jumlah koperasi di Jawa Barat. Jumlah koperasi terendah berada di Kabupaten Pangandaran yaitu sebesar 206 koperasi atau sebesar 0,83 persen dari keseluruhan jumlah koperasi di Jawa Barat dan Kota Cirebon yaitu sebesar 369 koperasi atau sebesar 1,5 persen dari jumlah keseluruhan koperasi di Jawa Barat. Berdasarkan jenisnya koperasi konsumen yang terbanyak yaitu sejumlah 18.515 unit, koperasi produsen 3.773 unit, koperasi simpan pinjam 2.179 unit, koperasi jasa 778 unit, dan koperasi

pemasaran 413 unit. Jumlah koperasi saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya

Jenis Koperasi	Jumlah
Koperasi Konsumen	18.515
Koperasi Produsen	3.773
Koperasi Simpan Pinjam	2.179
Koperasi Jasa	778
Koperasi Pemasaran	413

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Dari total koperasi 25.658 unit, hanya 11.201 unit koperasi yang aktif dan sisanya 14.457 unit adalah koperasi yang tidak aktif, yang berarti tidak sampai 50% koperasi yang aktif atau koperasi yang sehat di Provinsi Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi koperasi dilihat dari segi kuantitas di Jawa Barat saat ini dapat dikatakan memburuk. Koperasi yang tidak aktif jauh lebih banyak dari koperasi yang aktif. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2015-2017 koperasi aktif lebih mendominasi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif.

Koperasi produsen memiliki volume usaha sebesar Rp 1.283.224.308.459, modal sendiri Rp 308.349.720.984, modal luar Rp 270.570.067.798, dan SHU sebesar Rp 14.981.500.347. Koperasi konsumen memiliki volume usaha sebesar Rp 7.564.544.527.498, modal sendiri Rp 4.135.164.038.592, modal luar Rp 4.461.418.841.230, dan SHU Rp 404.962.839. Koperasi simpan pinjam memiliki volume usaha sebesar Rp 4.843.544.952.782, modal sendiri Rp 1.287.496.153.273, modal luar Rp 2.263.024.256.868, dan SHU Rp 130.126.536.006. Koperasi jasa memiliki volume usaha sebesar Rp 1.016.819.199.390, modal sendiri Rp 291.965.161.549, modal luar Rp 555.642.353.711, dan SHU Rp 59.552.015.501. Koperasi pemasaran memiliki volume usaha sebesar Rp 21.675.064.589, modal sendiri Rp 8.615.899.377, modal luar Rp 19.960.796.860, dan SHU Rp 1.490.290.198. Dari kelima jenis koperasi tersebut, hanya koperasi produsen yang memiliki modal sendiri lebih tinggi dibandingkan modal luar yaitu dengan modal sendiri sebesar Rp 308.349.720.984 dan modal luar sebesar Rp 270.570.067.798. Sedangkan untuk volume usaha dan SHU, koperasi konsumen dan koperasi simpan pinjam yang memiliki SHU lebih tinggi dibandingkan volume usahanya.

Koperasi-koperasi yang ada di daerah Jawa Barat tersebar kurang merata. Selisih antara daerah dengan koperasi terbanyak dan daerah dengan koperasi paling sedikit cukup besar. Berdasarkan diagram di atas, kota dengan jumlah koperasi terbanyak yaitu kota Bandung dengan jumlah koperasi sebanyak 2.575 unit dan kota dengan jumlah koperasi paling sedikit yaitu kota Cirebon dengan jumlah koperasi sebanyak 369 unit. Selain itu, hampir di setiap kabupaten/kota jumlah koperasi yang tidak aktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah koperasi yang aktif. Untuk jumlah anggota, koperasi binaan provinsi dan koperasi binaan nasional menjadi koperasi dengan anggota dan terbanyak meskipun jumlah koperasi binaan provinsi dan koperasi binaan nasional terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah koperasi di kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain itu, kota Bandung juga merupakan daerah dengan jumlah

anggota terbanyak di Jawa Barat. Selain menjadi koperasi dengan jumlah anggota terbanyak, koperasi binaan provinsi dan koperasi binaan nasional juga merupakan koperasi dengan jumlah karyawan dan manager terbanyak. Sedangkan untuk daerah dengan karyawan koperasi terbanyak di Jawa Barat yaitu kota Bandung, dan daerah dengan manager terbanyak yaitu kabupaten Tasikmalaya.

3.3 Proyeksi Perkembangan Perkoperasian di Jawa Barat

Tabel 2. Proyeksi Perkembangan Perkoperasian di Jawa Barat

Kabupaten Kota	Volume Usaha 2018	Proyeksi Volume Usaha 2019	Kenaikan 2018	Kenaikan 2019
Bogor	653.184.446.133	677.695.073.045,53	52,38	54,10
Sukabumi	245.647.896.909,00	283.010.757.260,04	29,51	38,82
Cianjur	260.276.935.878,00	341.633.491.262,22	2,67	21,78
Bandung	920.673.765.661,00	1.136.255.415.477,14	13,10	29,59
Bandung Barat	183.634.674.217,00	213.905.017.485,10	27,24	37,54
Sumedang	404.969.957.321,00	346.545.416.841,73	88,13	86,13
Garut	539.549.442.513,00	450.414.575.594,85	92,95	91,56
Tasikmalaya	289.058.543.313,00	354.325.071.280,55	14,83	30,52
Ciamis	41.989.680.820,00	54.080.315.314,80	2,05	23,95
Pangandaran	16.130.876.228,00	20.019.216.501,00	11,87	28,99
Kuningan	1.099.653.364.225,00	1.154.440.455.315,81	49,93	52,31
Cirebon	185.653.888.872,00	161.550.636.479,97	85,87	83,76
Majalengka	170.889.485.348,00	206.983.679.529,66	17,05	31,51
Indramayu	442.957.285.805,00	425.741.783.392,06	67,72	66,42
Subang	191.377.229.440,00	163.699.691.846,18	88,83	86,95
Purwakarta	463.189.286.661,00	536.779.500.875,63	28,17	38,02
Karawang	627.803.328.560,00	567.753.322.115,00	79,11	76,90
Bekasi	1.159.533.105.144,00	1.281.905.378.797,63	38,86	44,69
Kota Bogor	191.365.498.475,00	222.615.030.662,94	25,32	35,81
Kota Sukabumi	71.117.258.666,00	98.690.240.551,75	17,62	15,24
Kota Bandung	1.837.781.259.561,00	2.067.797.093.897,80	35,08	42,30
Kota Cirebon	26.389.439.139,00	34.062.740.824,07	1,74	23,87
Kota Bekasi	488.784.115.423,00	461.346.411.646,83	71,18	69,47
Kota Depok	149.044.750.594,00	163.500.927.015,55	40,62	45,87
Kota Cimahi	160.049.433.941,00	171.634.043.974,17	45,48	49,16
Kota Tasikmalaya	176.069.806.373,00	207.403.836.639,77	23,79	35,31
Kota Banjar	23.555.553.858,00	28.838.376.922,09	15,05	30,61

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan perhitungan dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 proyeksi kenaikan volume usaha tertinggi adalah pada Kabupaten Garut yaitu sebesar 92,95 persen dibandingkan dengan tahun 2017, diikuti oleh Kabupaten Subang yaitu sebesar 88,83 persen dan oleh Kabupaten Sumedang yaitu sebesar 88,13 persen. Sedangkan pada tahun 2019 proyeksi kenaikan volume usaha tertinggi adalah Kabupaten Garut yaitu sebesar 91,56 persen, diikuti oleh Kabupaten Subang yaitu sebesar 86,95 persen serta Kabupaten Sumedang sebesar 86,13 persen.

Kontribusi sektor koperasi di Jawa Barat bisa dihitung berdasarkan penerimaan pajak sektor koperasi. Dengan menghitung penerimaan pajak negara dari sektor koperasi, kita dapat menghitung berapa besar sumbangan pajak koperasi terhadap penerimaan negara. Kontribusi sektor koperasi di Jawa Barat bisa dihitung berdasarkan penerimaan pajak sektor koperasi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian

b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan menghitung penerimaan pajak negara dari sektor koperasi, kita dapat menghitung berapa besar sumbangan pajak koperasi terhadap penerimaan negara. Tabel di bawah ini merupakan hasil perhitungan proyeksi volume usaha koperasi di Jawa Barat tahun 2019 dengan menggunakan data volume koperasi Jawa Barat dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Volume usaha koperasi digambarkan sebagai omzet koperasi, sehingga dapat dihitung secara proksi untuk memproyeksikan kontribusi koperasi terhadap penerimaan pajak negara tahun tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut kontribusi koperasi terhadap penerimaan negara masih terhitung kecil sekali yaitu 0,000388 persen atau sekitar Rp551.016.515.453,90.

Tabel 3. Proyeksi Kontribusi Koperasi di Jawa Barat
Terhadap Penerimaan Negara

Kabupaten/ Kota	Penerimaan Pajak tahun 2018	Proyeksi Penerimaan Pajak 2019
Bogor	32.659.222.306,65	33.884.753.652,28
Sukabumi	12.282.394.845,45	14.150.537.863,00
Cianjur	13.013.846.793,90	17.081.674.563,11
Bandung Barat	9.181.733.710,85	10.695.250.874,26
Sumedang	20.248.497.866,05	17.327.270.842,09
Garut	26.977.472.125,65	22.520.728.779,74
Tasikmalaya	14.452.927.165,65	17.716.253.564,03
Ciamis	2.099.484.041,00	2.704.015.765,74
Pangandaran	806.543.811,40	1.000.960.825,05
Kuningan	54.982.668.211,25	57.722.022.765,79
Cirebon	9.282.694.443,60	8.077.531.824,00
Majalengka	8.544.474.267,40	10.349.183.976,48
Indramayu	22.147.864.290,25	21.287.089.169,60
Subang	9.568.861.472,00	8.184.984.592,31
Purwakarta	23.159.464.333,05	26.838.975.043,78
Karawang	31.390.166.428,00	28.387.666.105,75
Bekasi	57.976.655.257,20	64.095.268.939,88
Kota Bogor	9.568.274.923,75	11.130.751.533,15
Kota Sukabumi	3.555.862.933,30	4.934.512.027,59
Kota Bandung	91.889.062.978,05	103.389.854.694,89
Kota Cirebon	1.319.471.956,95	1.703.137.041,20
Kota Bekasi	24.439.205.771,15	23.067.320.582,34
Kota Depok	7.452.237.529,70	8.175.046.350,78
Kota Cimahi	8.002.471.697,05	8.581.702.198,71
Kota Tasikmalaya	8.803.490.318,65	10.370.191.831,99
Kota Banjar	1.177.777.692,90	1.441.918.846,10
TOTAL	551.016.515.453,90	591.631.375.027,49

Sumber : Data Diolah

4. PENUTUP

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan koperasi di Jawa Barat pada tahun 2019 dari sisi jumlah belum meningkat secara signifikan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi koperasi dilihat dari segi kuantitas di Jawa Barat saat ini dapat dikatakan memburuk. Koperasi yang tidak aktif jauh lebih banyak dari koperasi yang aktif. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2015-2017 koperasi aktif lebih mendominasi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif. Tetapi dilihat dari perkembangan usahanya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jenis koperasi yang paling banyak terdapat di Jawa Barat adalah koperasi konsumen, disusul oleh koperasi produsen kemudian koperasi simpan pinjam.

Proyeksi perkembangan volume usaha perkoperasian Jawa Barat tahun 2019 diproyeksikan akan meningkat. Tetapi ada beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat diproyeksikan mengalami penurunan volume usaha seperti dari kabupaten Sumedang, Garut, Cirebon dan Kota Bandung. Sumbangan koperasi Jawa Barat terhadap penerimaan negara masih tergolong kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saran kepada pemerintah dalam pengembangan koperasi adalah koperasi harus benar-benar dikelola secara profesional agar mampu menjadi wadah kegiatan ekonomi rakyat yang kondusif. Apabila hal ini dapat dilaksanakan pada setiap wilayah kecamatan, niscaya kemiskinan rakyat di seluruh penjuru Indonesia secara bertahap akan dapat diperbaiki kehidupan ekonominya. Apabila manajemen koperasi dilaksanakan secara benar dan profesional, maka rakyat yang menjadi anggota koperasi akan meningkat taraf hidupnya sesuai dengan tujuan koperasi. Dalam peningkatan taraf hidup ini berarti terjadi peningkatan kemampuan ekonomi (pendapatan/daya beli) dan peningkatan kemampuan non ekonomi (misalnya: pendidikan dan sosial). Dengan peningkatan kemampuan pendidikan dan sosial, mereka tentu akan lebih mampu meningkatkan lagi kemampuan ekonominya. Dengan demikian kemampuan ekonomi (pendapatan) mereka akan bertambah semakin besar.

Dengan pertambahan kemampuan ekonomi (pendapatan) tersebut diharapkan ketidakmerataan pendapatan antara masyarakat kecil dengan masyarakat menengah ke atas akan semakin diperkecil. Hal ini berarti bahwa ketidakmerataan pendapatan akan diperkecil dengan adanya peningkatan pendapatan rakyat kecil yang dibina melalui koperasi. Apabila koperasi dapat berkembang di setiap wilayah kecamatan di seluruh Indonesia, dan benar-benar mampu membina kegiatan ekonomi rakyat di sekitarnya, tentu koperasi akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Apalagi jika kegiatan ekonomi (produksi dan distribusi) anggotanya dapat berkembang dengan adanya pembinaan koperasi, niscaya kegiatan ekonomi anggota tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja tersendiri. Dengan demikian melalui koperasi yang dikelola secara benar dan profesional diharapkan akan diikuti dengan penciptaan-penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sangat potensial untuk melakukan perluasan produksi, karena jumlah koperasi yang sangat banyak dan variasi komoditinya pun sangat banyak. Apabila koperasi dikelola secara benar dan profesional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip koperasi (keadilan, kemandirian, pendidikan, dan kerja sama), maka tidak mustahil bahwa koperasi akan

dapat mempercepat perluasan produksi. Dengan perluasan produksi yang dibantu oleh koperasi ini diharapkan penawaran komoditi akan terus meningkat, dan pada akhirnya akan dapat mengendalikan kenaikan harga komoditi (inflasi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dinas UKM dan Jawa Barat. 2014. *Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Provinsi*. Jawa Barat.
- Dinas UKM dan Jawa Barat. 2015. *Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Provinsi*. Jawa Barat.
- Dinas UKM dan Jawa Barat. 2016. *Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Provinsi*. Jawa Barat.
- Dinas UKM dan Jawa Barat. 2017. *Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Provinsi*. Jawa Barat.
- Dinas UKM dan Jawa Barat. 2018. *Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Provinsi*. Jawa Barat.
- Kementerian Perdagangan Indonesia. 2018. *GDP Growth 2009 – 2018*. Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. *Kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. *Kontribusi Anggota dan Lembaga Koperasi terhadap PDB Nasional*.
- Ramudi, Ariffin. 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jatinangor: IKOPIN.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1998. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Artikel :

- Sukidjo. 2008. *Membangun Citra Koperasi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 5 No 2. Desember Hal 193 – 203.
- Suprayitno, Bambang (2007). *Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 4 No. 2; Hal 14-35.

Undang- undang :

- Pemerintah Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 *tentang Perkoperasian*. Lembaran RI Tahun 1992 No. 25. Jakarta : Sekretariat Negara.
- _____. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 *Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran RI Tahun 2000 No. 17. Jakarta : Sekretariat Negara
- _____. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak penghasilan*. Lembaran RI Tahun 2008 No. 36. Jakarta : Sekretariat Negara.
- _____. 2008. Peraturan Menteri Keuangan *Tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22*. PMK No 8. Tahun 2008.
- _____. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-197/PMK.03/2013 *tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. PMK No 197. Tahun 2013.

Website :

Badan Pusat Statistik. 2018. *Tingkat Inflasi Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>. Diakses tanggal 24 November 2018

Bank Indonesia. 2018. *BI-7Days Repo Rate*.
<https://www.bi.go.id/en/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>. Diakses tanggal 24 November 2018

World Bank. 2018. *Rupiah Per USDollar*.
<https://data.worldbank.org/country/indonesia>. Diakses tanggal 24 November 2018